



Fungsi Media Sosial TikTok dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo

Ahmad Mursyaban Ali^{1)*}, La Iru², Nerlin³ 

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia.

*Corresponding Author, Email: saban.ali@upi.edu

Received: 20 November 2025

Reviewed: 26 Januari 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi media sosial TikTok dalam mewujudkan Pendidikan politik mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan PPKn FKIP UHO. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model dari Miles dan Huberman yang dicirikan oleh tiga kegiatan/aktivitas, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa aktif PPKn angkatan 2020, 2021, 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial TikTok: (1) sebagai sumber informasi dan berita politik yang menyediakan berbagai berita dan informasi yang berada di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, (2) memperluas jangkauan interaksi berupa memberikan *like*, mengikuti akun, berkomentar, dan membagikan (*shear*) pengetahuan dan informasi politik, dan (3) mewujudkan pendidikan politik yang dilihat dari aspek kognitif, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam membentuk pemahaman mahasiswa PPKn. Dalam ranah afektif, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam mendorong dan membentuk sikap mahasiswa PPKn terhadap sebuah peristiwa. Dalam ranah psikomotorik, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam membentuk keterampilan mahasiswa PPKn dalam menghadapi sebuah isu-isu yang tersebar.

Kata kunci: Media sosial, TikTok, pendidikan politik, Mahasiswa.

The Function of TikTok Social Media in Realizing Political Education for PPKn Students at Halu Oleo University

Abstract: This study aims to describe the function of TikTok social media in realizing the political education of PPKn students at Halu Oleo University. This research was conducted at the PPKn Department, FKIP UHO. This type of research is descriptive research with a qualitative approach with data collection techniques namely observation, interviews, and document studies. The data analysis technique used is the model from Miles and Huberman which is characterized by three activities, namely data reduction, data presentation (*data display*), and conclusion drawing/verifying. The research subjects consisted of active PPKn students from the 2020, 2021, and 2022 classes. The results of the study show that TikTok social media: (1) as a source of political information and news that provides various news and information at the regional, national, and international levels; (2) expanding the reach of interactions in the form of giving likes, following accounts, commenting, and sharing (*shear*) political knowledge and information; and (3) realizing political education seen from the cognitive aspect, manifested from TikTok social media which becomes a channel in shaping the understanding of PPKn students. In the affective domain, TikTok serves as a channel for encouraging and shaping Civics students' attitudes toward an event. In the psychomotor domain, TikTok serves as a channel for developing Civics students' skills in addressing emerging issues.

Keywords: Social media, TikTok, political education, Students.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia pada tahun 2024 diprediksi memiliki jumlah penduduk sebesar 282.246.600. Dengan penduduk berusia produktif 15-64 tahun akan mendominasi dengan jumlah yang mencapai 191.570.000 atau 67,9% dari total, oleh karena itu pemuda akan mewarnai pesta demokrasi 2024 (Pusparsa, 2020). Pendidikan politik perlu diarahkan kepada mereka sehingga pemahaman politiknya terbentuk. Mengingat jumlah anak muda pada tahun 2024 mendominasi, maka dibutuhkan partisipasi aktif dari mereka terhadap proses politik yang sedang berjalan. Salah satu dari penduduk berusia produktif ini adalah mahasiswa.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan,

73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di tahun 2023 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024). Lebih lanjut dalam laporan APJII, bahwa survei penetrasi internet 2024, menunjukkan preferensi masyarakat dalam memilih konten. Isu terkait politik, sosial, hukum dan HAM menjadi jenis konten yang paling sering diakses masyarakat. Posisinya menggeser konten kesehatan yang pada survei sebelumnya menduduki posisi puncak (Muhamad, 2024).

Indonesia menjadi raja TikTok dengan pengguna terbanyak di dunia, melebihi Amerika Serikat dan Rusia. Menurut data terbaru tentang jangkauan iklan TikTok, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di seluruh dunia, jumlahnya mencapai 157,6 juta. Meskipun sempat diblokir sementara pada 2018 oleh pemerintah, aplikasi media sosial tersebut tetap banyak digunakan di Indonesia (Rakhmayanti, 2024). Data tersebut menunjukkan perkembangan media sosial TikTok di Indonesia yang mengalami peningkatan. Hadirnya *platform* media sosial TikTok, memberikan mahasiswa akses yang lebih besar terhadap informasi-informasi politik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2023) dengan judul Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Generasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media sosial dalam memberikan pendidikan politik tergolong sangat bagus. Akan tetapi realitas yang terjadi pada generasi Z di Banda Aceh ini kebanyakan dari mereka tidak menggunakan media sosial untuk mempelajari maupun mencari tahu mengenai pendidikan politik. Dalam penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa media sosial memiliki potensi dalam memberikan pendidikan politik. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Alamri dkk. (2023) dengan judul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik melalui media sosial harus benar-benar bisa merangsang anak muda untuk berperan aktif seaktif-aktifnya dalam politik dengan cara memperhatikan isu yang dimuat, dan beberapa isu yang bisa merangsang pemuda untuk terjun ke dalam dunia politik antara lain: lingkungan hidup, kesetaraan gender, hak asasi manusia, pendidikan, keadilan sosial, teknologi dan inovasi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa celah yang belum terisi dalam penelitian sebelumnya terkait pendidikan politik melalui media sosial. Penelitian Nadia (2023) dan Alamri dkk. (2023) menunjukkan peran media sosial secara umum dalam pendidikan politik generasi muda, namun belum memberikan fokus spesifik pada satu *platform* tertentu.

Selain itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada TikTok, sebuah *platform* media sosial yang unik dengan fitur interaktif yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini secara eksplisit menyoroti fungsi TikTok sebagai media sosial yang populer di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKn. TikTok memiliki fitur-fitur seperti *like*, komentar, dan *share*, yang mampu memperluas jangkauan informasi politik serta mendorong interaksi dan keterlibatan aktif penggunanya. Penelitian ini juga menganalisis pendidikan politik melalui tiga domain pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa dalam setiap kuliah, presentasi, dan diskusi, mahasiswa PPKn sering kali menjelaskan, mengajukan pertanyaan, atau memberikan jawaban yang tampaknya tidak mencerminkan pemahaman mereka sendiri. Meskipun akses terhadap kekayaan informasi di berbagai media sosial, termasuk isu-isu politik terkini, sangat melimpah, mereka sering kali tidak memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal. Mereka cenderung lebih memilih untuk mencari jawaban melalui mesin pencari seperti Google dan langsung membaca informasi yang ditemukan, tanpa mengaitkannya dengan isu-isu aktual yang sedang terjadi. Pendekatan ini membuat mereka hanya mengandalkan informasi yang tidak mendalam. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas politik yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah sejauh mana fungsi media sosial TikTok dalam mewujudkan pendidikan politik mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Jenis penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan subjek tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil subjek tertentu yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian penentuan subjeknya dilakukan tidak secara acak (Nasution, 2023). Peneliti menentukan subjek penelitian ini dengan membatasi cakupan pada mahasiswa aktif PPKn Universitas Halu Oleo dari angkatan 2020, 2021, 2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) Observasi atau pengamatan, 2) Wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara tatap muka; 3) Studi dokumen, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini dicirikan oleh tiga kegiatan/aktivitas, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*) (Karsadi, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Media Sosial TikTok sebagai Sumber Informasi dan Berita Politik

Sebagai *platform* penyebaran informasi dan budaya, TikTok telah menjadi wadah untuk menyoroti isu-isu seperti hak asasi manusia, politik, dan budaya populer. (Satria dkk., 2024). Konten edukatif di TikTok mencakup berbagai topik yang memperkaya pengetahuan dengan cara yang menarik bagi generasi digital (Barus dkk., 2024). Selanjutnya, media sosial Tiktok terdapat banyak konten edukasi yang dapat menambah wawasan baru bagi para penggunanya, juga terdapat banyak informasi seputar kehidupan sehari-hari hingga berita, baik berita lokal maupun berita yang ada di dunia (Irawan, 2024). Lebih lanjut, TikTok selalu memberikan informasi yang terbaru (*update*) berdasarkan apa yang sedang trending di TikTok (Akbar dkk., 2024).

Informasi dan berita yang disaksikan oleh mahasiswa PPKn merupakan berita dan informasi berkaitan mengenai situasi politik yang sedang viral di media sosial TikTok. Cakupan berita dan informasi tersebut pun memuat:

- a. Lingkup daerah, dengan menyaksikan berbagai kegiatan politisi daerah Sulawesi Tenggara
Seperti yang terlihat dari hasil wawancara peneliti bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:
“ya, pernah itu saya saksikan kegiatan-kegiatannya politisi daerah seperti mereka R dan RT. Banyaklah mereka *update-update* kegiatan kesehariannya mereka, apalagi dekat-dekat mau pilkada ini, kegiatannya bersama masyarakat mereka sering bagikan di TikTok” (Wawancara 04 Juni 2024).
 - b. Lingkup nasional, dengan menyaksikan dinamika politik yang terjadi di pusaran kekuasaan yakni di pemerintahan pusat.
Seperti yang terlihat dari hasil wawancara peneliti bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:
“saya dapatkan itu ada konten yang membahas isu-isu yang sedang hangat terjadi di Indonesia terkait kebijakan pemerintah JW. Video tersebut menyajikan berbagai analisis dan kritik dari parah tokoh, ahli, akademisi, dan bahkan masyarakat” (Wawancara 04 Juni 2024).
 - c. Lingkup internasional, dengan menyaksikan postingan terkait konflik Palestina-Israel
Seperti yang terlihat dari hasil wawancara peneliti bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn Angkatan 2022:
“saya dapatkan juga mengenai politik luar negeri atau internasional tentang peristiwa di Palestina di barengi dengan isu mengenai Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanannya yang dirumorkan akan ditangkap oleh ICC. Itu viral di berbagai media sosial TikToku” (Wawancara 28 Mei 2024).
- Berdasarkan teori mengenai media sosial TikTok sebagai sumber informasi dan berita politik dari Satria dkk, Barus dkk, Irawan, Akbar dkk dan hasil penelitian ini, terdapat keselarasan. TikTok sebagai *platform* media sosial berfungsi dalam memperluas wawasan politik mahasiswa PPKn melalui akses terhadap isu-isu penting, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. TikTok menyediakan konten edukatif yang membantu mahasiswa PPKn memahami dinamika politik, termasuk isu hak asasi manusia, konflik global, dan budaya populer, serta menyajikan informasi terkini berdasarkan tren yang berkembang. Mahasiswa PPKn memanfaatkan *platform* ini sebagai sumber pembelajaran interaktif untuk mengakses berita politik yang relevan, memperkaya pengetahuan, dan mendalami berbagai persoalan politik.
- d. Memberikan tanda suka (*like*): adalah tindakan mahasiswa PPKn untuk menunjukkan apresiasi atau ketertarikan terhadap sebuah postingan
Seperti yang terlihat dari hasil wawancara peneliti bersama Sinta Mulianata mahasiswa PPKn angkatan 2020:
“kunjungan JW kemarin di Muna itu saya berikan *like*. Seru saja itu kita lihat orang nomor satu di Indonesia berkunjung di daerahnya kita dan dekat dengan para warganya” (Wawancara 05 Juni 2024).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan mahasiswa PPKn menggunakan fitur ini untuk menunjukkan apresiasi pada berbagai postingan yang menarik perhatian mereka, seperti postingan yang memperlihatkan

kedekatan presiden dengan rakyatnya, postingan yang viral, serta postingan yang menunjukkan argument-argumne kritis.

- e. Mengikuti akun lain: adalah aktivitas mahasiswa PPKn untuk tetap terhubung dengan informasi dan isu politik yang relevan dengan minat atau kebutuhan. Seperti yang terlihat dalam hasil wawancara di bawah ini.

Hasil wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn Angkatan 2020:

“saya *follow* akun politisi yang ada di Sulawesi Tenggara seperti R sama RT. Karena awalnya saya tertarik dengan orangnya, nah pas muncul diberandaku, saya lihat postingan-postingannya, saya tertarik untuk ikuti, supaya saya lihat juga bagaimana rencana-rencananya mereka kedepan untuk daerah di Sulawesi Tenggara ini” (Wawancara 04 Juni 2024).

Hal wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“aktor politik yang saya ikuti itu ada Partai D, saya ikuti karena akun ini sering muncul di berandaku dan sering membagikan informasi tentang kegiatan partai dan para kader-kadernya di daerah” (Wawancara 12 Juni 2024).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan mahasiswa PPKn menggunakan fitur ini untuk mengikuti berbagai akun yang memiliki keterkaitan dengan isu politik, seperti mengikuti akun aktor politik daerah, aktor politik nasional, akun perseorangan/tim, akun berita nasional, dan akun *fanbase*. Melalui fitur mengikuti akun ini, mahasiswa PPKn akan menciptakan algoritma TikTok pada akun mereka, sehingga postingan-postingan yang muncul di beranda akan semakin relevan dengan isu-isu politik yang menjadi minat mereka.

- f. Memberikan komentar: adalah aktivitas mahasiswa PPKn untuk menyampaikan pendapat secara tertulis pada kolom komentar yang tersedia di media sosial TikTok. Seperti yang terlihat dalam hasil wawancara di bawah ini.

Hasil wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“saya pernah komen itu ada juru bicara Kemendikbud yang menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah tersier. Lalu saya komen bahwa untuk apa kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea ke-4 itu, apa artinya?” (Wawancara 28 Mei 2024).

Hasil wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“awalnya sebenarnya saya mau komen-komen begitu, karna saya baca-baca komennya orang-orang kaya tidak diterima oleh netizen begitu semacam di hujat, jadi agak ragu begitu. Kontennya itu kemarin tentang visi-misinya PS tentang makan siang gratis” (Wawancara 21 Juni 2024).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan mahasiswa PPKn cenderung tidak secara aktif menggunakan fitur ini. Hal ini terlihat dari beberapa pola perilaku, seperti ada mahasiswa yang memberikan komentar, namun sebagian lainnya ragu-ragu untuk berkomentar, atau bahkan memilih untuk tidak memberikan komentar sama sekali terhadap isu-isu politik yang muncul.

- g. Membagikan (*share*) pengetahuan dan informasi: adalah tindakan menyebarluaskan konten dari satu platform media sosial ke media sosial lain. Seperti yang terlihat dalam hasil wawancara di bawah ini.

Hasil wawancara bersama Temizan Rai mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya baru-baru ini dukung salah satu capres. Konten-konten yang ada ARB sering saya bagikan di grup WhatsApp angkatan. Untuk tarik-tarik suara teman-temanlah dan teman-teman lain juga bisa lihat capres yang saya dukung” (Wawancara 07 Mei 2024).

Hasil wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“pernah, konten-konten terkait pernyataan dari wakil presiden terpilih Gibran, dia mengeluarkan argument tentang Kementerian Makan Siang, itu saya share ke grup-grub WhatsApp angkatan, grup teman-teman kampung juga, terus saya tanya apa pendapat teman-teman terkait berita itu.” (Wawancara 28 Mei 2024).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan mahasiswa PPKn menggunakan fitur ini untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi mengenai isu-isu politik yang sedang viral. Mereka membagikan konten tersebut ke media sosial lain, seperti WhatsApp, khususnya melalui grup angkatan mahasiswa PPKn.

Berdasarkan teori mengenai aspek interaksi sosial di media sosial TikTok dan hasil penelitian yang mengkajii aspek tersebut dalam ranah politik bagi mahasiswa PPKn menunjukkan keselarasan. TikTok, sebagai *platform* media sosial, menyediakan berbagai fitur interaktif yang memberikan kesempatan mahasiswa PPKn untuk berinteraksi dengan konten politik seperti memberikan *like*, mengikuti akun,

berkomentar dan membagikan pengetahuan ataupun informasi. Namun, dalam hal penggunaan fitur komentar, terdapat kecenderungan mahasiswa PPKn untuk enggan berkomentar. Beberapa dari mereka ragu-ragu untuk memberikan komentar karena khawatir akan akibat dari pendapat yang mereka ungkapkan, sementara sebagian lainnya memilih untuk tidak berkomentar sama sekali terhadap isu-isu politik yang muncul.

Media Sosial Tik Tok dalam Mewujudkan Pendidikan Politik

1. Aspek Kognitif Pendidikan Politik

Media sosial Tik Tok menyediakan berbagai informasi dan berita politik yang dapat membangun pengetahuan mahasiswa PPKn tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan sehingga mereka dapat memahami dan mengetahui lima persoalan di atas. Mulai dari pembahasan mengenai:

a. Demokrasi dan hak-hak warga negara: mendapatkan konten yang membahas mengenai:

1) Nilai-nilai dan prinsip fundamental dalam demokrasi yang terwujud dari:

(a) Postingan RG mengenai definisi demokrasi, mahasiswa PPKn memperoleh wawasan dan pemahaman baru tentang konsep demokrasi yang sering mereka pelajari. Postingan tersebut memberikan perspektif yang berbeda dan memperkaya pengetahuan mereka mengenai makna demokrasi. Seperti hasil wawancara bersama Temizan Rai Angkatan 2021:

“pernah saya temukan, ceramahnya RG yang paling mengesankan menurutku terkait definisi demokrasi yang dia sampaikan. Kalau pengertian umum yang sering kita dengarkan tentang demokrasi itu pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Nah kalau dia katanya pemerintah akal melalui pemerintahan orang.” (Wawancara 07 Mei 2024).

(b) Setelah menyaksikan postingan terkait desakan terhadap Anies, mahasiswa PPKn mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang demokrasi melalui pandangan ARB. Postingan ini memberi mereka pemahaman mengenai dinamika politik dalam kerangka demokrasi, serta pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi. Seperti hasil wawancara bersama Rivaldi Maha angkatan 2021:

“waktu itu, saya sering menemukan video-video Desak Anies di beranda TikToku. Disitu saya sering saksikan, banyak pembahasan-pembahasan yang membicarakan demokrasi bersama masyarakat” (Wawancara 05 Mei 2024).

(c) Dalam konteks pendidikan demokrasi, program *talkshow* ILC yang sering muncul di TikTok memberikan pemahaman mahasiswa PPKn mengenai berbagai isu penting. Program ILC juga memberikan pencerahan mengenai hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Postingan ini memberi mereka pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan demokrasi dan hak-hak warga negara dari para ahli, tokoh, dan pengamat politik yang hadir di ILC tersebut. Seperti hasil wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah angkatan 2022:

“biasa itu di TikTok saya dapati pembicaraan-pembicaraan di ILC yang membahas yang membahas berbagai isu penting, seperti hak-hak warga negara. Dalam postingan- postingan tersebut, banyak diskusi yang membahas hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, seperti hak untuk memilih, hak atas kebebasan berbicara, dan hak-hak lainnya yang terkadang jarang dibahas dalam keseharian kita.” (Wawancara 28 Mei 2024).

2) Peristiwa yang menggambarkan situasi yang demokratis yang terwujud dari:

Postingan demonstrasi mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden JW memberikan pemahaman dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut memperlihatkan bagaimana salah satu prinsip fundamental demokrasi, yaitu kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, diterapkan secara nyata melalui aksi demonstrasi. Mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik, sekaligus menjadi wujud pelaksanaan hak-hak demokratis di masyarakat. Seperti hasil wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“saya biasanya lebih ke konten-konten kebebasan berpendapat yang saya saksikan kemarin di TikTok, banyak video yang membahas tentang demo-demonya mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan isu 3 periode yang cukup ramai dibicarakan. Saya sering melihat video-video aksi dari mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden. Konten-konten seperti itu menarik perhatian saya karena selain menampilkan

- aksi nyata, juga menggambarkan suara rakyat yang berusaha untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak untuk berbicara dan berpendapat” (Wawancara 04 Juni 2024).
- 3) Peristiwa-peristiwa yang tidak diterima dalam sistem demokrasi tergambar dari:
- (a) Postingan tentang PM yang mematikan mikrofon anggota parlemen dalam rapat paripurna memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menampilkan situasi di mana seorang anggota parlemen sedang menyampaikan pandangannya, namun mikrofon yang digunakannya dimatikan pimpinan. Melalui postingan ini, mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam menjamin kebebasan berbicara dan menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muhammad Zamri Adha Musyarfan mahasiswa PPKn angkatan 2020:
- “pernah muncul itu di berandaku saat rapat-rapat paripurna di DPR, dimana PM dia kasi mati micnya orang yang sedang berbicara dan banyak komentar-komentar yang muncul yang tidak sepakat dengan perbuatan PM. Dari video itu, saya pahami bagaimana proses demokrasi di dalam lembaga legislatif kita berjalan tidak sesuai dengan harapan orang banyak” (Wawancara 01 Juni 2024).
- (b) Postingan tentang kasus korupsi SYL memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menjelaskan bagaimana uang rakyat digunakan untuk keperluan pribadi keluarganya. Melalui postingan ini, mahasiswa PPKn dapat memahami bagaimana penegakan hukum dan penyalahgunaan uang rakyat dilakukan oleh pejabat publik. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Sinta Mulianata mahasiswa PPKn angkatan 2020:
- “waktu itu saya kepo dan penasaran mengenai kasus korupusnya SYL, karena pernah saya nonton itu bahwa ulang tahun cucu kesayangannya dibiayai dengan uang rakyat. Jadi saya saksikanmi video-video yang membahas mengenai kasusnya itu. Setelah banyak kali muncul diberandaku itu saya memahami bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat parah, bentuk korupsi yang saya baru dengar. Bisa-bisanya uang rakyat dia gunakan untuk keperluan seluruh anggota keluarganya, untuk ulang tahun cucunya, hingga skincare, dan masi banyak lagi” (Wawancara 05 Juni 2024).
- (c) Postingan tentang kritik RG mengenai nepotisme memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menyoroti pandangan RG mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan GRR. Melalui postingan ini mahasiswa PPKn dapat memahami bentuk intervensi kekuasaan yang tidak sehat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:
- “itu tentang kolusi dan nepotisme, pendapat-pendapatnya ahli seperti RG yang sempat kritik tentang GRR yang produk nepotisme. Kemarin itu RG di acara TV dia bahas itu usia cawapres yang diubah, terus yang dikritisi itu ketua MK yang pamanya GRR. Dari video itu saya mendapatkan pemahaman mengenai peristiwa tersebut merupakan bentuk intervensi kekuasaan yang tidak sehat, di mana keputusan tersebut sangat jelas menguntungkan hanya satu pihak yakni GRR” (Wawancara, 21 Juni 2024).
- 4) Demokrasi dalam hubungan global, yang terwujud dari:
- (a) Postingan debat calon presiden (capres) memberikan wawasan penting bagi mahasiswa PPKn dalam memahami peran Indonesia di kancah internasional. Salah satu pernyataan yang disampaikan oleh ARB dalam debat tersebut menyoroti visi untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang berdaulat di negeri sendiri dan tamu yang mempesona di negeri orang lain. ARB juga menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak sekedar hadir dalam pertemuan internasional seperti di PBB, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan perdamaian dunia. Melalui konten ini, mahasiswa PPKn dapat memahami pentingnya kepemimpinan internasional yang kuat dan bagaimana peran Indonesia dapat ditingkatkan di arena global. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nanda Sri Rahayu mahasiswa PPKn angkatan 2021:
- “kemarin itu masa-masanya pemilu, sering saya saksikan debat-debatnya capres. mereka membahas banyak hal. Yang saya ingat itu kemarin tentang pernyataannya pak ARB. Dia bilang ingin menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tamu yang mempesona di negeri orang lain. Lebih lanjut dia sampaikan bahwa negara Indonesia harus dapat ambil bagian, bukan sekedar kita hanya hadir saja di pertemuan-

pertemuan di PBB sana tapi kita dapat benar-benar bersuara serta ambil bagian dalam menentukan perdamaian dunia begitu. Setelah saya nonton itu, saya pahami bahwa pak ARB ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Indonesia sudah lama redup di tingkat internasional” (Wawancara 11 Mei 2024).

- (b) Postingan tentang konflik Palestina-Israel memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa PPKn terkait dinamika konflik internasional yang kompleks. Konten ini menyoroti upaya negara-negara dalam mencari *win-win solution* untuk kedua belah pihak, serta memperlihatkan bagaimana konflik tersebut melibatkan kepentingan politik, agama, dan sejarah yang panjang. Mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa isu ini tidak hanya menyangkut hubungan bilateral, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik global dan peran aktif negara-negara lain dalam menjaga perdamaian dunia. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“kebanyakan video-video tentang konflik Palestian-Israel sih kak, ada juga terkait negara-negara yang mengusahakan dua negara itu *win-win solution*. Saya pahami dari berbagai postingan tersebut bahwa konflik ini sangat kompleks kak, karena melibatkan banyak kepentingan politik, agama dan sejarah yang sudah berlangsung lama” (Wawancara 27 Juni 2024).

- b. Kedaulatan rakyat: mendapatkan konten yang membahas mengenai:

1) Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dari:

- (a) Postingan tentang konsep dasar demokrasi memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa PPKn terkait prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sebuah konten, definisi demokrasi "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" hal tersebut menyoroti bahwa kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Hal ini membantu mahasiswa PPKn dalam memahami esensi demokrasi sebagai sistem yang berorientasi pada kepentingan bersama. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya sering jumpai kemarin itu tentang pembahasan mengenai arti dari demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Saya pahami dari hal tersebut bahwa asal muasal dari sebuah kekuasaan itu dari rakyat dan dijalankan oleh mereka juga” (Wawancara 12 Juni 2024).

- (b) Postingan yang merujuk pada ajakan ARB di desak anies. Dalam video tersebut, ARB menekankan pentingnya menggunakan hak suara secara bijak karena pilihan yang diambil akan menentukan masa depan Indonesia. Konten ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa PPKn tentang pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Rivaldi Maha mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“pernah saya dapatkan video-video Desak Anies itu yang membahas mengenai kedaulatan rakyat. Saya ingat itu kemarin, dimana ARB menekankan kita untuk menggunakan hak suara kita dengan bijak, karna akan menentukan Indonesia kedepannya” (Wawancara dengan Rivaldi Maha, 05 Mei 2024).

2) Mekanisme dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang terwujud dari:

- (a) Postingan tentang tutorial dan simulasi cara memilih atau mencoblos memberikan pemahaman yang penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Melalui video tutorial tersebut, mahasiswa PPKn memahami dengan jelas bagaimana cara mencoblos yang sah dan tidak sah, serta pentingnya memperhatikan prosedur yang benar saat menggunakan hak pilih. Dengan melihat konten-konten semacam ini, mahasiswa PPKn menjadi lebih paham tentang pentingnya partisipasi aktif yang tepat dalam proses pemilu untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Sinta Mulianata mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“kemarin itu saya saksikan ada video yang menampilkan cara-cara memilih atau mencoblos. Semacam tutorial dan simulasinya begitu. Dari video tersebut tentu saya ketahui bagaimana mencoblos yang sah dan tidak sah” (Wawancara 05 Juni 2024).

- (b) Postingan tentang keterlibatan artis dan influencer dalam menggunakan hak suara memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Melalui video yang menampilkan artis-artis menggunakan hak suara mereka di TPS, mahasiswa PPKn memahami bahwa keterlibatan publik figur dapat memotivasi masyarakat, khususnya penggemarnya, untuk berpartisipasi dalam pemilu demi masa depan bangsa. Seperti yang terlihat dalam wawancara

bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“pernah saya saksikan artis-artis menggunakan hak suaranya, dengan datang ke TPS. Dari video itu saya pahami bahwa dengan keterlibatan mereka dapat menjadi potensi menarik hati rakyat khususnya penggemarnya untuk menggunakan hak suaranya” (Wawancara, 27 Juni 2024).

- 3) Kecurangan pemilu yang terwujud dari: postingan mengenai dugaan praktik kecurangan dalam pemilu memberikan pemahaman yang penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten yang membahas isu kecurangan seperti surat suara yang sudah dicobloskan sebelumnya, memberikan wawasan bagi mahasiswa PPKn tentang tantangan yang sering dihadapi dalam setiap proses pemilu. Mahasiswa PPKn memahami bahwa masalah seperti ini selalu muncul dalam setiap pemilu, sehingga penting untuk memiliki sistem pengawasan yang transparan dan mekanisme hukum yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muhammad Zamri Adha Musyarfan mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“pernah saya dapatkan konten seperti waktu pemilu baru-baru ini. Banyak pembicaraan-pembicaraan katanya tidak bersih, banyak yang sudah dicobloskan. Dari hal tersebut saya jadi lebih paham bahwa hal-hal tersebut pasti selalu terjadi disetiap pemilihan.” (Wawancara, 01 Juni 2024)

- c. Sistem kelembagaan negara: mendapatkan konten yang membahas mengenai:

- 1) Lembaga eksekutif yang terwujud dari:

- (a) Postingan mengenai peresmian proyek-proyek oleh Presiden JW memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten yang menampilkan berbagai kegiatan Presiden JW, seperti peresmian proyek pembangunan infrastruktur, memberikan gambaran bagi mahasiswa PPKn tentang upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui konten tersebut, mahasiswa PPKn memahami bahwa Presiden JW berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“kalau berbicara eksekutif, saya pernah saksikan kegiatan-kegiatan Presiden JW seperti kemarin, peresmian bendungan di Sulawesi Tenggara yang menelan anggaran kalau nda salah 9 triliun.” (Wawancara 12 Juni 2024)

- (b) Postingan mengenai spekulasi calon menteri setelah pemilu memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten yang membahas isu mengenai kemungkinan paslon nomor urut 3 GP, yang akan menjadi Menteri dalam kabinet Presiden terpilih, serta tanggapan GRR yang menepis isu tersebut, menunjukkan dinamika politik pasca pemilu. Mahasiswa PPKn memahami bahwa spekulasi terkait susunan kabinet dan pertemuan antar calon sering menjadi perbincangan dalam politik Indonesia. Hal ini memberikan wawasan mengenai proses negosiasi dan strategi politik yang sering kali berkembang setelah pemilu. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“kalau kemarin itu saya dapatkan isu bahwa paslon no urut 3 GP akan jadi Menteri di kabinetnya Presiden terpilih, kemudian ditepis sama GRR bahwasanya tidak ada yang ajak dia. Saya pahami bahwa spekulasi-spekulasi terkait calon-calon menteri setelah usai pemilu memang menjadi isu yang sering beredar. Apalagi isu mengenai rangkul merangkul antar sesama paslon waktu pemilihan kemarin” (Wawancara, 21 Juni 2024).

- (c) Postingan tentang pernyataan LBP yang menyarankan untuk tidak memasukkan orang yang "toxic" ke dalam kabinet memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut mengangkat pentingnya mempertimbangkan rekam jejak dan karakter calon anggota kabinet dalam proses seleksi. Mahasiswa PPKn memahami bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan efektif, karakter serta kemampuan untuk bekerja sama adalah faktor penting yang harus diperhatikan, agar kabinet dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terhambat oleh konflik internal atau ketegangan antar anggota. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“saya pernah saksikan pembahasan mengenai pernyataan LBP yang bilang jangan masukan orang yang toxic ke dalam kabinet. Saya jadi paham bahwa dalam memilih anggota kabinet perlu mempertimbangkan rekam jejak, bahkan karakter yang dimilikinya. Hal tersebut menurutku agar pemerintahan menjadi solid dan dapat bekerja sama dengan baik” (Wawancara, 27 Juni 2024).

2) Lembaga legislatif yang terwujud dari:

- (a) Postingan tentang hak angket DPR memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten yang membahas hak angket ini mengingatkan mahasiswa PPKn tentang fungsi dan tugas DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap tindakan eksekutif dalam menjalankan undang-undang. Mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa hak angket merupakan salah satu mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan rakyat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nanda Sri Rahayu mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“kemarin kan sempat sering muncul itu pembahasan-pembahasan mengenai hak angket DPR di berandaku. Saya pernah dengar dan pelajari sebenarnya hak-hak itu, tapi saya lupa jadi pas saya lihat di TikTok yang bahas itu, saya cobami ketik di pencaharianya itu tentang tugas-tugas DPR. Jadi saya ingatmi kembali, kalau hak angket itu adalah haknya DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif. Maksudnya di selediki itu presiden dalam dia menjalankan undang-undang” (Wawancara 11 Mei 2024).

- (b) Postingan tentang rapat di Senayan mengenai kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut memperlihatkan bagaimana anggota DPR merespons isu kenaikan UKT dengan cepat melalui rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan. Mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa respons cepat legislatif terhadap isu sensitif seperti ini penting untuk melindungi hak dasar warga negara, khususnya dalam hal akses pendidikan yang terjangkau. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muhammad Zamri Adha Musyarfan mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“kemarin itu tayangan rapat di Senayan mengenai UKT mahasiswa yang dikabarkan naik dan diadakan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan. Disini saya melihat bagaimana wakil kita merespon dengan cepat terkait isu ini. Karena isu ini sensitif apalagi mengenai uang. Apalagi isu ini terkait dengan hak dasar setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan” (Wawancara 01 Juni 2024).

3) Lembaga yudikatif yang terwujud dari:

- (a) Postingan tentang persoalan umur capres dan cawapres yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menunjukkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia capres dan cawapres memengaruhi dinamika politik, terutama dalam Pemilu 2024. Melalui konten tersebut, mahasiswa PPKn dapat memahami bagaimana keputusan hukum bisa berdampak langsung pada proses demokrasi dan kepemimpinan negara. Selain itu, mahasiswa PPKn juga dapat memahami pentingnya independensi lembaga hukum dalam menangani isu-isu yang melibatkan kepentingan politik, serta bagaimana keputusan tersebut bisa menimbulkan persepsi publik mengenai keberpihakan, terutama dalam kasus yang melibatkan hubungan keluarga. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah, mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“pernah saya dapatkan dimana Mahkamah Konstitusi banyak sekali mendapatkan sindiran-sindiran bahwa mereka itu adalah Mahkamah Keluarga. Karena viralnya kasus kemarin terkait batas umur capres dan cawapres yang diubah di Mahkamah Konstitusi dan pada saat itu yang ketuanya pamanya GRR” (Wawancara 28 Mei 2024).

- (b) Postingan tentang keputusan Mahkamah Agung yang viral terkait usia calon gubernur memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut mengangkat isu perubahan kebijakan mengenai usia pejabat yang memunculkan anggapan bahwa keputusan tersebut memberikan keuntungan bagi calon terkait dengan kekuasaan, seperti anak Presiden. Melalui postingan ini, mahasiswa PPKn dapat memahami bahwa keputusan hukum yang kontroversial ini menimbulkan persepsi publik tentang potensi praktek kolusi dan nepotisme, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yudikatif. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022: “ada juga tentang Mahkamah Agung yang baru-baru viral, terkait umur-umur juga, sama kaya GRR di Mahkamah Konstitusi. Dimana itu banyak anggapan atau pembahasan bahwa keputusan tersebut merupakan karpet merah lagi buat anak presiden, dalam hal ini KP” (Wawancara 27 Juni 2024).

- (c) postingan tentang sengketa pemilu yang dibahas oleh paslon dalam konteks peran Mahkamah

Konstitusi memberikan pemahaman penting dalam pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menampilkan bagaimana paslon-paslon saling beropini tentang kecurangan dalam pemilu, di mana paslon 1 dan 3 menganggap paslon 2 melakukan kecurangan. Melalui konten tersebut, mahasiswa PPKn dapat memahami peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan memberikan keputusan yang sah atas permasalahan yang timbul. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa angkatan 2020:

“untuk ranah yudikatif kemarin mengenai sengketa pemilu kemarin sering saya saksikan, dimana paslon 1 dan 3 beropini bahwa paslon 2 melakukan kecurangan. Hal tersebut memberikan pemahaman saya Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu yang tidak diterima oleh paslon yang kalah” (Wawancara 04 Juni 2024)

d. Hubungan kekuasaan pusat dan daerah: mendapatkan konten yang membahas mengenai:

1) Gubernur representasi pemerintah pusat yang terwujud dari: postingan mengenai keseharian RK sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menampilkan bagaimana RK sebagai pemimpin daerah mendekati diri dengan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang sedang berjalan di daerahnya. Melalui postingan ini, mahasiswa PPKn dapat memahami pentingnya keterlibatan gubernur dalam memastikan program-program pemerintah terlaksana dengan baik. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“nah kan saya itu follow RK dan dia kemarin itu posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, jadi kadang dia bahas kesehariannya tentang kegiatan-kegiatan pemerintahannya. Bagaimana dia mendekati diri dengan Masyarakat, mengawasi program-program yang sedang berjalan di daerahnya begitu” (Wawancara 27 Juni 2024).

2) Pemindahan Ibu Kota Negara yang terwujud dari: Postingan tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menjelaskan alasan pemindahan ibu kota, termasuk faktor kepadatan Jakarta dan upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui konten tersebut, mahasiswa PPKn memahami bahwa keputusan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan akses antar wilayah. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Sinta Mulianata mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“pernah kemarin saya sempat dapatkan video yang menjelaskan atau memberikan informasi bahwa Jakarta sekarang bukan ibu kota lagi, namun sudah di pindahkan ke IKN. Dari postingan tersebut saya pahami bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota selama ini membuatnya sangat padat dan tidak seimbang dengan daerah-daerah lain, pemindahan Ibu Kota menjadi keputusann pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah lainnya dengan menetapkan IKN yang merepresentasikan titik sentral dari Indonesia” (Wawancara 05 Juni 2024).

e. Sistem ekonomi: mendapatkan konten yang membahas mengenai:

1) Postingan mengenai PPn yang terwujud dari: postingan tentang pernyataan Menteri Perekonomian AI terkait kenaikan PPn memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten tersebut menjelaskan keputusan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan kenaikan PPn sebagai bagian dari rencana keberlanjutan ekonomi. Mahasiswa PPKn memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan antara PS-GRR dan JW, yang mencerminkan kesepahaman dalam melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“kemarin saya dapatkan potongan video tentang pernyataan dari Menteri Perekonomian AI. Dia menyebutkan bahwa karna kita sudah memilih keberlanjutan maka kenaikan PPn akan dilanjutkan. Saya pahami bahwa PS-GRR dengan JW semacam satu paket keberlanjutan, jadi apa yang ditetapkan dan dilakukan oleh JW akan dilanjutkan oleh PS-GRR, termasuk kebijakn PPn tersebut” (Wawancara 28 Mei 2024).

2) Postingan mengenai kebijakan bea cukai yang terwujud dari: Postingan tentang kebijakan bea cukai yang mahal memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Konten-konten yang memperlihatkan harga barang impor yang dibayar lebih mahal akibat bea cukai yang tinggi. Mahasiswa PPKn memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga daya saing produk Indonesia. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Widia Wati mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“pernah saya saksikan yang di TikTok tentang bea cukai, ada orang yang beli sepatu itu di Singapur kah, yang harganya 10 jutaan, tapi barangnya itu lewat di bea cukai harganya jadi 30 juta lebih, kemudian diviralkanmi di TikTok. Yang saya pahami memang itu merupakan kebijakan dari beacukai untuk membatasi barang-barang dari luar masuk ke Indonesia. (Wawancara 17 Mei 2024).

- 3) Postingan mengenai kritik terhadap sistem ekonomi nasional yang terwujud dari: Postingan tentang utang negara dan pengelolaan sumber daya alam memberikan pemahaman penting dalam konteks pendidikan politik bagi mahasiswa PPKn. Melalui video yang menampilkan pernyataan SZ tentang utang yang membelit perusahaan negara seperti Pertamina, mahasiswa PPKn dapat memahami tantangan besar dalam sistem ekonomi negara. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“beberapa hari lalu saya saksikan diberanda TikToku, ada konten yang menjelaskan tentang utang. Kurang lebih isi videonya menyajikan pernyataan pak SZ, bahwa: kita ke partamina bayar *cast*, tapi kenapa pertamina dililit hutang, kemudian kita beli gas, tapi Perusahaan yang tangani gas terlilit hutang. Dari video tersebut saya dibukakan pikiranku, saja jadi paham bagaimana buruknya sistem ekonomi kita” (Wawancara 04 Juni 2024)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh M. Nur Khoiron mengenai aspek kognitif dalam pendidikan politik dan hasil penelitian yang mengkaji konten politik di media sosial TikTok terhadap mahasiswa PPKn menunjukkan bahwa keduanya sejalan. TikTok, sebagai *platform* media sosial, telah menyediakan berbagai informasi dan berita politik yang relevan dengan kelima persoalan tersebut, yang dapat memperluas pemahaman mereka.

2. Aspek Afektif Pendidikan Politik

Media sosial TikTok menyediakan berbagai informasi dan berita politik, dan berbagai edukasi lainnya yang dapat membentuk karakter untuk mengambil sikap terhadap peristiwa yang mereka saksikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian aspek afektif pendidikan politik mahasiswa PPKn:

a. Sebagai anggota masyarakat, ia mandiri, yang terwujud dari:

- 1) Postingan mengenai kebijakan tapera mendorong mahasiswa PPKn untuk bersikap terhadap komentar-komentar negatif yang beredar di media sosial TikTok, yang banyak menyalahkan PS-GRR. Padahal, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden JW. Mahasiswa PPKn menunjukkan sikap dengan merasa heran dan tidak setuju terhadap banyaknya komentar yang salah sasaran tersebut, karena kebijakan itu masih dalam masa pemerintahan Presiden JW dan bukan tanggung jawab PS-GRR. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“konten-konten begitu itu memang banyak sekali yang buat di TikTok. contoh kemarin, persoalan gaji-gaji masyarakat yang akan dipotong 3% itu yang namanya “tapera”. Kemudian banyak muncul komentar yang menyalahkan PS-GRR. Kan aneh, sekarang ini masih masanya JW bukan tanggungjawabnya PS-GRR. Kenapa meraka yang dibawah-bawah? Saya merasa heran sekaligus tidak setuju dengan banyaknya komentar yang menyalahkan PS-GRR atas kebijakan dari pemerintahan Presiden JW tersebut” (Wawancara 04 Juni 2024)

- 2) Postingan mengenai utang ARB yang beredar saat beliau maju dalam Pilgub Jakarta mendorong mahasiswa PPKn untuk bersikap lebih kritis. Pada awalnya, mereka merasa heran dan bingung melihat banyaknya informasi yang beredar. Rasa penasaran ini mendorong mereka untuk melakukan pengecekan lebih lanjut melalui Google dan YouTube. Setelah melakukan *crosscheck*, perasaan terkejut dan lega muncul karena informasi yang beredar ternyata benar, bukan hanya kabar burung yang sengaja disebar untuk menjatuhkan ARB. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muhammad Zamri Adha Musyarfan mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“kemarin pas masa-masanya Pilpres terkait masalah pak ARB yang banyak video-video bertebaran tentang utangnya 50 Miliar waktu dia maju Pilgub Jakarta. Awalnya saya merasa heran dan bingung karena banyak sekali beredar video-video tersebut. Disitu saya coba *crosschek* kembali, mulai dari cari-cari di Googel dan cari-cari penjelasan juga di YouTube, dan padahal itu benar. Ketika saya temukan bahwa informasi itu benar adanya, saya merasa terkejut sekaligus lega juga, bahwa informasi itu bukan hanya kabar burung yang di edarkan dengan sengaja untuk menjatuhkan pak ARB” (Wawancara, 01 Juni 2024).

- 3) Postingan mengenai rekam jejak pendidikan para paslon, khususnya terkait GRR, mendorong mahasiswa PPKn untuk bersikap lebih kritis. Mereka merasa curiga karena banyaknya komentar yang

beredar mengenai foto wisuda GRR, yang tampaknya bertujuan untuk menggiring opini publik. Rasa curiga ini mendorong mahasiswa PPKn untuk mencari informasi lebih lanjut dengan melakukan pengecekan melalui TikTok, Google, dan YouTube. Setelah melakukan *crosscheck*, mereka merasa lebih lega karena menemukan penjelasan yang lebih jelas dan akurat mengenai foto tersebut. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“yah, kalau saya pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan yang rasanya ingin menggiring kita. Kemarin itu tentang rekam jejak Pendidikan dari para paslon, yang sa ingat kemarin tentang GRR, muncul komentar-komentar tentang foto dia wisuda. Saya merasa curiga sih, karena rasanya ada niat untuk menggiring opini kita terkait GRR. kemudian saya coba telusuri lebih lanjut begitu. saya *crosscheck* dia di TikTok, Googel dan di Youtube. Setelah saya cek-cek, saya merasa lebih lega, karena menemukan penjelasan lebih jelas mengenai foto tersebut” (Wawancara 28 Mei 2024).

- 4) Postingan sepotong-sepotong di TikTok mengenai isu kekerasan membuat mahasiswa PPKn merasa cemas dan ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Mereka merasa takut jika hanya mengandalkan potongan informasi yang terbatas, terutama terkait isu kekerasan yang bisa menimbulkan salah paham. Mahasiswa PPKn memutuskan untuk mencari versi lengkapnya melalui YouTube. Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa informasi tersebut benar adanya, terkait dengan insiden pengambilan tanah warga secara paksa yang disertai penggunaan gas air mata oleh aparat, yang bahkan mengenai anak-anak sekolah di sekitar lokasi. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“kemarin juga itu ada konten sepotong-potong di TikTok, kemudian saya larikan ke Youtube untuk cari lebih fullnya. Kemarin saya merasa takut jangan sampai saya setengah-setengah dapat informasi, apalagi terkait isu kekerasan, jangan sampai salah paham. Setelah saya cek kemarin itu tentang kekerasan, dimana ada tanah warga yang diambil paksa dan di semburkan gas air mata sama aparat itu hingga kena ke anak-anak sekolah di dekat sana” (Wawancara, 21 Juni 2024).

b. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara

1) Tanggung jawab pribadi, terwujud dari:

- (a) Mengambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan, mahasiswa PPKn terinspirasi melalui beberapa postingan di media sosial TikTok:

- (1) Postingan dari akun PG yang fokus pada isu lingkungan, khususnya kebersihan, disaksikan oleh mahasiswa PPKn. Melalui berbagai konten tentang aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh PG, mahasiswa PPKn merasa tertarik untuk meniru tindakan serupa di daerah mereka. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Rivaldi Maha mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya sebagai putra daerah di Wabula, ada namanya destinasi wisata Kali Topa Wabula. Disana kami lihat banyak sampah-sampah, yang kemudian saya dan warga desa melakukan bersih-bersih. Saya mengikuti kegiatan bersih-bersih itu selain merasa prihatin, salah satunya juga memang dipicu oleh konten-konten media sosial di TikTok. Saya mengambil contoh dari PG, disitu saya merasa bahwa kenapa mereka PG ini bisa melakukan aksi bersih-bersih, kenapa di daerahku tidak bisa saya terapkan juga ” (Wawancara 05 Mei 2024)

- (2) Postingan dari akun WI yang sering menampilkan destinasi wisata Indonesia yang bersih dan asri juga memotivasi mahasiswa PPKn. Melalui konten-konten tersebut, mereka merasa terdorong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri di tempat tinggal mereka. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“kemarin kami dengan Karantaruna Desa mengadakan atau menyediakan tong sampah organik dan non organik untuk disetiap warga. Saya merasa terdorong dan senang sekali melihat bagaimana kebersihan dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata dan itu saya saksikan dari TikTok. Saya terinspirasi dari konten-konten destinasi wisata yang menunjukkan suasana daerah yang bersih dan asri dari konten- konten WI Wtersebut.” (Wawancara 12 Juni 2024).

- (b) Mengambil bagian dalam menumbuhkan minat baca, mahasiswa PPKn terinspirasi melalui beberapa postingan di media sosial TikTok:

- (1) Postingan mengenai rendahnya tingkat literasi di Indonesia mendorong mahasiswa PPKn

untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatannya. Merespon kondisi tersebut, mahasiswa PPKn merasa peduli, prihatin, dan bahkan malu. Sebagai bentuk kontribusinya, mereka mendirikan komunitas literasi dan membuka lapak-lapak baca untuk membantu meningkatkan literasi di masyarakat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Temizan Rai mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya pernah nonton konten yang membicarakan tentang rendahnya literasi di Indonesia. Katanya sekian persen begini tingkat literasi pendidikan kita. Katanya dari 1000 orang hanya 1 orang yang minat bacanya tinggilah, atau hobi membaca. Saya kan juga mahasiswa saya merasa peduli untuk meningkatkan literasi ini. Jadi saya buka-bukami lapak baca begitu, saya juga bikin komunitas literasi begitu, saya kasi nama KPL. Ini berawal dari salah satunya memang keresahan, prihatin dan malu juga dengan kondisi tersebut” (Wawancara 07 Mei 2024).

- (2) Postingan mengenai *voulater* pendidikan yang bergerak dan menyusur tempat-tempat terpencil mendorong mahasiswa PPKn untuk mengambil langkah yang sama. Dengan konten tersebut membuat mahasiswa PPKn merasa kagum sehingga terinspirasi untuk mengambil bagian dalam kegiatan serupa di daerahnya. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“ada itu di TikTok pernah saya saksikan kegiatan orang-orang semacam voulater yang pergi ke tempat-tempat terpencil begitu kak, untuk membagikan ilmu. Kalau di kampungku Pasar Wajo itu ada komunitas yang namanya GB kak. GB itu komunitas yang bergerak di sektor literasi begitu kak. Saya terdorong untuk berkontribusi di Gerilya Buton itu salah satunya memang dari konten-konten TikTok tadi. Saya merasa kagum dan terinspirasi dengan bagaimana komunitas-komunitas tersebut mampu berbuat sesuatu yang nyata di masyarakat. Saya merasakan ada panggilan dalam diri saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa di daerah saya” (Wawancara 21 Juni 2024).

- (3) Postingan mengenai motivasi untuk melanjutkan pendidikan turut mendorong mahasiswa PPKn untuk dapat melakukan hal yang sama. Mahasiswa PPKn merasa ada panggilan dari dalam diri untuk berbagi semangat dan dorongan yang sama kepada anak muda di daerahnya, dengan harapan mampu mendorong lebih banyak orang untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“pernah saya dapatkan itu kontennya semacam motivasi-motivasi kepada anak-anak mudah untuk melanjutkan pendidikannya untuk adik-adik kami yang di kampung sana yang ingin melanjutkan kuliah saya berikan motivasi-motivasi dan membagikan pengalaman-pengalaman kuliah ku, sehingga mereka ada dorongan untuk lanjut kuliah. Jadi begini sebenarnya dari diri sendiri tapi karna kita lihat juga konten yang saya sebutkan tadi, saya merasa tersentuh. Dari situ saya sempat terpikir: oh boleh ini seharusnya saya buat juga begini. Saya merasa ada panggilan dari diri saya untuk mencoba bermanfaat sehingga kita di kampung dinilai juga bagus-bagus karena pemikirannya yang dewasa begitu.” (Wawancara 04 Juni 2024)

- 2) Tanggung jawa politik, terwujud dari:

- (a) Berpartisipasi sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan pemilu 2024, mahasiswa PPKn terinspirasi menjadi anggota KPPS melalui konten yang membahas keanggotan tersebut. Rasa antusias dan tertarik menjadi anggota KPPS menjadi bagian yang dilakukan mahasiswa PPKn setelah menyaksikan postingan mengenai KPPS ini. Selain itu juga, sebagai sumber informasi, mahasiswa PPKn merasa penasaran dan terdorong untuk mencari tahu mengenai informasi-informasi mengenai pemilihan, yang akan membantu mereka dalam perannya sebagai KPPS. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nanda Sri Rahayu mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“kan saya jadi anggota KPPS kemarin itu. Sebelum tanggal 14, saya merasa memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyuluhan ke warga-warga di dekat rumahku. Tugas itu membuat saya ingin membereikan yang terbaik jadi saya cari-cari itu materi penyuluhan juga di TikTok, untuk tambah-tambah pengetahuanku dan kosa kataku pas turun di lapangan dan saya dapat percaya diri pas penyuluhan itu. Kan waktu di dalam TPS itu ada bilik-biliknya kemudian ada warna-warnanya juga, saya kurang paham warna-warnanya itu untuk apa. Jadi

saya merasa penasaran dan terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut dan saya carimi di TikTok” (Wawancara 11 Mei 2024).

- (b) Berpartisipasi dalam memberikan edukasi politik, mahasiswa PPKn merasa terdorong untuk dapat memberikan informasi yang benar mengenai kabar burung yang tersebar di masyarakat kampungnya mengenai rekam jejak ARB. Mahasiswa PPKn merasa memiliki tanggung jawab sebagai orang yang memiliki akses informasi untuk dapat meluruskan kabar yang ada di masyarakat tersebut. Informasi-informasi tersebut didapatkannya dari media sosial TikTok. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“sebelum pemilu itu kaya banyak sekali yang belum mengenal atau mengetahui dari 3 calon presiden di kampungku, nah jadi saya ketika pulang di kampung itu mereka itu tanya-tanya, bagaimana rekam jejaknya calon. Saya merasa tergerak untuk membantu menjelaskan, terutama saat diskusi itu sama orang-orang tua kampung disana pada saat kami duduk-duduk tunggu giliran mencoblos, tapi diskusinya diskusi ringan begitu. Mereka itu membahas salah satu calon disitu langsung saya ikut masuk menjelaskan. Calon Presiden yang dibahas kemarin itu Pak ARB. Saya merasa perlu untuk meluruskan yang awalnya katanya rekam jejaknya Pak ARB itu dia tidak jelas, disana kaya kurang informasi begitu jadi saya coba jelaskanmi tadi tentang rekam jejaknya. Pernah jadi Gubernur pernah juga jadi Menteri Pendidikan. Saya merasa memiliki tanggungjawab sebagai orang yang memiliki sedikit lebih banyak informasi dari konten TikTok membuat saya ingin berbagi dengan mereka” (Wawancara, 28 Mei 2024).

3) Tanggung jawab ekonomi, terwujud dari:

- (a) Berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata, mahasiswa PPKn merasa terdorong untuk dapat mengambil bagian dalam mengembangkan destinasi wisata di daerahnya. Mahasiswa PPKn merasa kagum serta bangga dengan postingan akun WI yang memperlihatkan keindahan alam yang tidak kalah dari luar negeri. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“kami sebagai elemen pemudah berpartisipasi bersama teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan destinasi wisata sebagai pengembang atau mendorong faktor ekonomi disitu. Sekali lagi saya terinspirasi dari konten-kontennya WI. Saya merasa kagum serta bangga bagaimana akun WI memperlihatkan keindahan- keindahan alam Indonesia yang tidak kalah dari luar negeri. Saya merasa terdorong secara emosional untuk membawa pesan-pesan positif tersebut ke daerahku dengan keindahan alam destinasi wisata yang dijaga baik-baik dapat menarik para turis untuk berkunjung.” (Wawancara, 12 Juni 2024)

- (b) Mempromosikan jualan UMKM, mahasiswa PPKn merasa terdorong untuk dapat membagikan (*shear*) jajanan UMKM di daerahnya, hal ini terinspirasi dari berbagai konten artis-artis yang melakukan hal serupa di media sosial TikTok. Membuat mahasiswa PPKn merasa tertarik melakukannya juga. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“ikut membeli produk UMKM keripiki kaca dan saya mempromosikan juga di Instagram. Saya dalam hal ini memang salah satunya terdorong karena konten TikTok. Sekarang inikan banyak itu konten *creator* yang mempromosikan makanan-makanan dan banyak yang tertarik dengan itu istilahnya *influencer*, jadi saya merasa tertarik juga ingin melakukan hal yang sama, dengan membagikannya di IG-ku.” (Wawancara 27 Juni 2024)

c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, yang terwujud dari:

1) Postingan mengenai kesadaran tentang pelanggaran HAM di masa lalu yang terwujud dari:

- (a) Postingan mengenai kasus Marsinah yang kembali muncul di FYP TikTok bertepatan dengan peringatan Hari Buruh 2024 mendorong mahasiswa PPKn untuk merefleksikan peristiwa tersebut. Kisah Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh membuat mereka merasa pekah, prihatin, dan tergugah atas ketidakadilan yang terjadi, sekaligus menyadarkan mereka akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap individu, terutama buruh. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muhammad Zamri Adha Mursyarfan mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“pernah itu dapat di fypku itu pas masuk bulan buruh kemarin tentang kasus dibunuhnya M. Itukan haknya mereka mengeluarkan pendapat tapi dia dibungkam dengan cara dibunuh supaya tidak memprovokasi masyarakat disana. Saya merasa kita perlu lebih pekah

- terhadap peristiwa HAM. Dengan munculnya kembali kasus M ini bertepatan dengan hari buru membuat saya merasa sangat prihatin serta terganggu kembali dan saya lebih sadar bahwa kita semua harus menghormati hak-hak orang lain” (Wawancara 01 Juni 2024).
- (b) Postingan mengenai debat capres di TikTok yang membahas isu HAM, terutama tuduhan terhadap PS sebagai pelanggar HAM, mendorong mahasiswa PPKn untuk merefleksikan peristiwa tersebut. Tuduhan berulang yang selalu muncul menjelang pemilu membuat mereka merasa kecewa, bingung, dan prihatin, karena isu HAM sering kali dipolitisasi tanpa dasar yang jelas. Mereka menyadari pentingnya menghargai setiap individu, bersikap empati, dan tidak terburu-buru menghakimi, mengingat semua orang memiliki cerita dan hak untuk dihormati. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:
- “kemarin itu pernah saya nonton di TikTok itu pada saat konten debat capres yang menyangkut persoalan HAM, bahwa seakan-akan PS ini pelanggar HAM, dari menculik, membunuh. Tapi faktanya kalau PS ini betul-betul pelanggar HAM harusnya sudah lama ditangkap. Dia ini kalau maju selalu isu-isu HAM dimunculkan dan ditunjukkan kepada PS. Dari persoalan tersebut saya merasa kecewa dan sedikit jengkel mendengar itu-itu terus isu yang selalu di berikan kepada PS. Selain itu, perasaan saya antara bingung dan prihatin karena isu HAM ini selalu di politisasi begitu saja. Saya merasa dari peristiwa ini yang selalu berulang-ulang tuduhan kepada PS pada momen- momen yang sama yakni pemilu, saya merasa bahwa tidak boleh kita menuduh terus menerus, kita harus menghargai setiap orang, melihat dengan empati dan tidak terburu- buru menghakimi, karena semua orang punya cerita dan hak untuk dihargai” (Wawancara 04 Juni 2024).
- (c) Postingan di TikTok mengenai Hari Kamisan yang berlangsung di depan Istana Negara memberikan kesan mendalam bagi mahasiswa PPKn. Aksi yang konsisten dilakukan setiap hari Kamis ini, meski sering kali ramai pada momen pemilu, menjadi pengingat akan pentingnya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini membuat mahasiswa PPKn semakin sadar akan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu dan berharap pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi yang telah lama diperjuangkan tersebut. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Temizan Rai mahasiswa PPKn angkatan 2021:
- “di TikTok kemarin saya saksikan Hari Kamisan pas masa-masanya pilpres. Orang- orang yang berorasi didepan Istana mengenai pelanggaran HAM begitu. Hari kamisan ini setau saya memang dilaksanakan setiap hari kamis di depan istana dan sering muncul pas masa-masa pemilu. Karena momentum pemilihan pemimpin republik ini menjadi harapan juga salah satunya untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Dari video-video tersebut saya menyaksikan bagaimana mereka dengan tegas mengingatkan saya dan kita semua harusnya untuk tidak mengabaikan mereka, ayolah pemerintah harusnya merespon mereka yang sudah lama terus menerus setiap kamis datang ke depan Istana, hujan pun mereka tetap datang. Karena itu, saya semakin sadar tentang pentingnya untuk menghormati hak pribadi setiap orang” (Wawancara 07 Mei 2024).
- 2) Postingan mengenai tokoh inspiratif pembela HAM, terwujud dari: postingan di TikTok mengenai perjuangan MLK memberikan kesan mendalam bagi mahasiswa PPKn. Pencarian informasi melalui TikTok mempertemukannya dengan berbagai konten yang menjelaskan perjuangan MLK sebagai pembela hak sipil dan kesetaraan bagi warga kulit hitam. Melalui konten tersebut menggugah perasaan mahasiswa PPKn akan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, warna kulit, atau golongan. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nanda Sri Rahayu mahasiswa PPKn angkatan 2021:
- “kemarin itukan pas pertukaran di UPI ada mata kuliah teori-teori pemikiran politik, disitu kita dikasi tugas sama Prof. KS. saya dapat tokoh namanya MLK. Saya cari- carimi di TikTok tentang tokoh ini, setelah saya sering cari-cari di TikTok seringmi dia muncul video-video yang menjelaskan tokohku ini. MLK ini seorang yang lantang membela hak sipil dan warga kulit hitam. Setelah saya saksikan video-video tentang perjuangan MLK saya merasa lebih menghargai betapa pentingnya untuk menghormati hak-hak setiap orang, tanpa melihat rasnya, warna kulitnya atau golongan. Dan juga membukakan mata saya tentang betapa pentingnya menghargai hak asasi setiap orang” (Wawancara 11 Mei 2024)
- 3) Postingan mengenai isu-isu HAM di Indonesia, yang terwujud dari:
- (a) Postingan di TikTok mengenai kasus eksekusi mati FB, seorang pengedar narkoba, menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, yang dilihat oleh mahasiswa PPKn. Video- video yang muncul

memperlihatkan perdebatan pro dan kontra terkait hukuman mati terhadap FB. Sementara sebagian berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, yang lain berargumen bahwa membasmi pelaku narkoba lebih penting untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkannya. Melalui konten tersebut, mahasiswa PPKn lebih terfokus pada korban dari peredaran narkoba. Mereka merasa bahwa narkoba telah merusak banyak orang, dan penting untuk menghargai setiap individu dengan tidak merusak satu sama lain. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Widia Wati mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya pernah dapatkan di TikTok itu tentang FB, kan dia itu pengedar narkoba terus di hukum mati. Ada pro dan kontra terkait kasusnya, ada yang bilang itu melanggar hak asasi manusia, kemudian ada yang bilang basmi saja dari pada dampak yang dia tebarkan bisa merusak. Kalau yang saya rasakan dari menyaksikan konten-konten tentang FB ini lebih kepada para korban. Dimanakan narkoba ini merusak banyak orang, dan banyak korban yang menderita, kita harusnya lebih menghargai setiap individu, janganlah kita merusak antar sesama kita” (Wawancara 17 Mei 2024).

- (b) Postingan di TikTok mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan Kelompok Bersenjata (KKB) di Papua mendorong mahasiswa PPKn untuk bersikap. mahasiswa PPKn merasakan betapa sulitnya mengatasi masalah di Papua. Video-video yang disaksikannya membuatnya lebih merenungkan pentingnya menghargai hak hidup setiap individu, tanpa membenarkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, mahasiswa juga terkejut dan prihatin melihat pandangan KKB yang menganggap diri mereka sebagai korban pelanggaran HAM, meskipun mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka sendiri telah melanggar HAM. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Fikri mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“pernah salah satu konten yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu yang muncul di konten Fyp saya itu adalah yang ada di Papua sana. Dimana KKB ini hanya tahu untuk menyerang orang yang ada didekatnya, kemudian ketika misalnya seseorang katakanlah Abdi Negara menyerang KKB, disitu pihaknya KKB mereka itu merasa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan negara. Padahal mereka sendiri tidak sadar sudah melanggar Hak Asasi Manusia tersebut. Saya merasa terkejut dan bingung karena ada ketidakadilan mereka dalam memandang HAM. Saya merasa prihatin dengan kondisi tersebut bang. Hal itu membuat saya berpikir lebih dalam dan merasa penting untuk terus memahami dan menghargai HAM” (Wawancara 12 Juni 2024).

- 4) Postingan mengenai kriminalitas dan hukum, yang terwujud dari: postingan mengenai kasus pembunuhan V yang sempat dibahas di akundi media sosial TikTok membuat mahasiswa PPKn merasa sedih dan prihatin. Melalui konten yang membahas kronologi dan proses hukum kasus tersebut, mahasiswa PPKn merenungkan betapa pentingnya menghargai kehidupan setiap individu. Peristiwa tragis tersebut membuatnya semakin sadar akan nilai hak hidup yang perlu dihormati. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Meli Milanda mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“kasus pembunuhannya V. Kemarin itu kronologinya, proses hukumnya V begitu. Akun di politik Indonesia itu ada sekilas dia bahas, kemudian di akun-akun lain sih kak yang random-random begitu. Menyaksikan kasus tersebut, saya merasa sedih dengan kejadian tragis tersebut. Saya menjadi berpikir, betapa pentingnya menghargai hidup setiap orang” (Wawancara 27 Juni 2024).

- 5) Postingan mengenai kejahatan genosida di Palestina yang dibagikan di TikTok membuat mahasiswa PPKn merasa sangat tersentuh dan marah. Video tersebut menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh Israel, seperti penghancuran rumah sakit dan penyiksaan terhadap anak-anak. Menyaksikan kekerasan tersebut, mahasiswa PPKn semakin sadar akan pentingnya menghormati hak hidup setiap individu dan menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan semacam itu. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Muh. Sabri Alfatah mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“pernah, terkait kejahatan Genosida yang terjadi di Palestina. Disitu diperlihatkan bagaimana rumah-rumah sakit di hancurkan, anak kecil disiksa, dan masi banyak lagi kebringasan yang dilakukan Israel itu, jadi kontennya itu tentang itu. Saya merasa sangat tersentuh sekaligus marah dengan menyaksikan kekejaman yang dilakukan Israel itu. Bagaimana bisa ada manusia yang begitu kejam di. Melihat kekejaman itu, saya semakin sadar betapa pentingnya untuk menghormati hak asasi setiap orang, apalagi mengenai hak hidup setiap orang. Dari konflik Palestina-Israel ini membuat saya merasa tidak ada alasan apapun untuk membenarkan kekerasan seperti itu” (Wawancara 28 Mei 2024).

- d. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, yang terwujud dari:
- 1) Berpartisipasi dalam rapat panitia hari besar nasional, terwujud dari: Postingan mengenai perlombaan dan kegiatan 17 Agustus yang muncul di TikTok menginspirasi mahasiswa PPKn untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat. Konten TikTok yang menunjukkan keseruan lomba-lomba Agustus memberi dorongan mahasiswa PPKn untuk mengadakan kegiatan serupa yang meriah di kampungnya. Berbagai ide yang ditemukan mahasiswa PPKn di TikTok mengenai kegiatan tersebut membuatnya semakin bersemangat untuk menghadirkan kemeriahan serupa di kampungnya, dengan harapan agar suasana kesenangan dan kebersamaan dapat dinikmati oleh seluruh warga. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya kemarin berpartisipasi dan diberikan kepercayaan oleh pihak desa dan kecamatan sebagai koordinator bidang di paguyuban untuk mengawal perayaan 17 Agustus 2023. Saya sebagai koordinator bidang di Paguyuban. Pada saat rapat-rapatnya itu untuk kegiatan 17 itu kami diskusi-diskusikan apa saja yang kami akan lakukan. Nah untuk ide-idenya memang ada lewat di TikTok itu tentang kegiatan-kegiatan 17 Agustus yang dilakukan oleh anak-anak muda lah. Nah disitu salah satunya memang terinspirasi dari apa yang mereka lakukan itu. Melihat keseruan dari daerah-daerah lain itu dalam memeriahkan agustusan membuat saya memiliki semangat, supaya kemeriahan dan kesenang tersebut ada juga di kampungku pada saat perayaan agustusan” (Wawancara 12 Juni 2024).
 - 2) Berpartisipasi dalam pertemuan RT/RW, terwujud dari: mahasiswa PPKn yang mengikuti pertemuan desa terkait permasalahan air bersih di desanya namun tidak merasa terdorong oleh konten TikTok dalam partisipasinya. Dalam rapat tersebut, mahasiswa hanya menyaksikan diskusi yang dihadiri oleh warga, pengelola air, kepala desa, dan perangkat desa lainnya. Mahasiswa PPKn merasa penting untuk memahami dan menyaksikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“pertemuan di kampungku itu pernah saya ikuti, kemarin itu rapat tentang permasalahan Air di desaku, jadi saya cuman menyaksikan. Ada yang hadir itu warga, kemudian pengelola air, kepala desa, terus perangkat-perangkat desa lainnya juga ada” (Wawancara 21 Juni 2024)
 - 3) Berpartisipasi dalam mengawal kebijakan DPRD, yang terwujud dari: Postingan di TikTok mengenai isu harga minyak dan wacana 3 periode Presiden JW menginspirasi mahasiswa PPKn untuk turun ke jalan dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa PPKn merasa tergerak setelah melihat demonstrasi serupa yang terjadi di kampus-kampus besar seperti UI, UGM, dan UNHAS. Mereka merasa marah dan kecewa dengan isu tersebut, yang semakin diperkuat dengan pembahasan dan di TikTok, sehingga memotivasi mereka untuk bergabung dalam aksi. Emosi yang nampak dari video tersebut membuat mahasiswa PPKn semakin yakin bahwa isu ini penting, mendorongnya untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut serta dalam demonstrasi. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Temizan Rai mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“demo di DPRD itu demo besar itu harga minyak dan isu 3 periode JW. Mahasiswa UHO itu turun demo, sa ikut barisan itu, kami jalan kaki dari kampus menuju kantor DPRD. Nah sebelum di sini ada pergerakan di TikTok, di pulau-pulau jawa sana di UI, UGM, UNHAS, mereka demo kan hal yang sama. UHO meresponmi juga dengan hal sama. Saya ikut merasa marah, kecewa dan akhirnya ikut untuk bergerak bersama teman-teman sesama almamater” (Wawancara 07 Mei 2024).
- e. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat, terwujud dari: Berpartisipasi dalam memviralkan kasus hukum yang terwujud dari:
- 1) Postingan di TikTok mengenai kasus WMS yang kembali diangkat setelah viralnya film dokumenter membuat mahasiswa PPKn merasa tersentuh dan terdorong untuk memberikan dukungan. Melalui tindakan sederhana seperti memberikan *like* pada konten-konten yang membahas kasus tersebut, mahasiswa berharap dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keadilan yang seharusnya diterima oleh WMS. Dengan memberikan *like*, mereka merasa turut berkontribusi dalam membuat video semakin viral, karena yakin bahwa semakin viral suatu kasus, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan perhatian dan keadilan. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nanda Sri Rahayu mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya berikan like pada kasunya WMS yang diulik kembali. Disitukan setelah viralnya film dokumenter tentang WMS itu terangkat kembali kasunya WMS di Publik, disitu saya *like-like*. Waktu saya melihat kontennya, saya merasa harus memberikan dukungan, kasus ini menyentuh hati saya dan saya ingin orang-orang lebih aware terhadap keadilan yang seharusnya didapatkan.

Dengan saya ikut meramaikan postingan-postingan tersebut dengan cara memberikan like saya berharap dapat membantu membuat video semakin viral. Ingatkan *no viral no justice*” (Wawancara 11 Mei 2024).

- 2) Postingan di TikTok mengenai kasus penangkapan PGS terkait kasus V yang menyebar di kalangan mahasiswa PPKn memicu diskusi dan keprihatinan mendalam. Mahasiswa PPKn merasa sedih dan marah karena penangkapan tersebut berdasarkan dugaan tanpa bukti yang jelas, dan mereka merasa tidak adil jika orang yang tidak bersalah dihukum hanya karena kesamaan nama atau wajah. Diskusi ini kemudian diperluas di tongkrongan, dengan beberapa mahasiswa merasa penting untuk menyebarkan informasi yang mereka temui di TikTok. Mereka yakin bahwa dengan membagikan kasus ini, baik melalui grup WhatsApp maupun diskusi bersama, mereka bisa turut mendorong proses hukum yang lebih adil dan menambah kesadaran publik. Hal ini membuat mahasiswa PPKn menganggap semakin banyak orang yang peduli dan kasus ini semakin viral, penegak hukum akan merasa lebih terdorong untuk bertindak dengan benar. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn angkatan 2020:

“persoalan V itu kami diskusikan. Mereka menangkap orang yang belum betul-betul terbukti bahwa dia adalah pelakunya. Namun hanya sama namanya muka agak mirip jadi yang jadi sasaran itu orang tidak tau apa apa kasian. Saya merasa sangat sedih dan marah sekaligus. Rasanya tidak adil sekali. Orang yang tidak bersalah seharusnya tidak dihukum hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang jelas. Ini bikin saya berpikir betapa pentingnya kita menegakkan hukum dengan benar. Dengan informasi-informasi yang saya temu di TikTok terkait PGS dan saya bawa ke tongkrongan saya bersama senior saya yakini dapat memberikan dampak untuk tersebarluasnya kasus ini.” (Wawancara 04 Juni 2024)

- 3) Postingan mengenai persoalan GRR yang dibagikan di TikTok memicu diskusi di kalangan mahasiswa PPKn, yang merasa terdorong untuk membagikan informasi dan berpartisipasi dalam pembicaraan tentang keadilan hukum. Dapat dilihat dari berbagai sikap mahasiswa yang merasa senang dengan membagikan peristiwa tersebut, merasa lucu namun sekaligus jengkel karena konten tersebut menyindir ketidakadilan hukum di Indonesia, serta merasa bertanggung jawab untuk memberi tahu keluarganya yang kurang mengakses TikTok tentang perkembangan situasi politik. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Nursyabila mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“saya bagi-bagikan itu konten bercandaan tentang hukum semacam sarkas begitu. Itu kemarin gambar-gambar sakras dimana GRR itu dilindungi oleh keluarganya. Mulai dari bapaknya, kemudian pamannya yang di MK begitu. Saya merasa lucu sekaligus jengkel kak, kontennya itu dia menyindir sekali soal keadilan dan hukum di negeri kita. Rasanya ada yang salah, tapi kita cuman bisa ketawa pahit istilahnya. Saya yakin dengan membagikan sarkas-sarkas begitu, orang-orang lebih sadar dan peduli, mungkin dengan hal sarkas begitu bisa menjadi awal untuk membicarakan keadilan hukum yang lebih serius kedepannya kak” (Wawancara, 21 Juni 2024).

Berdasarkan teori M. Nur Khoiron mengenai aspek afektif dalam pendidikan politik, yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang berpihak pada demokratisasi dan kedaulatan rakyat dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya sejalan. Mahasiswa PPKn tidak hanya memperoleh informasi politik, tetapi juga merasakan dampak emosional yang mendalam, yang menggugah rasa tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi. TikTok bukan hanya sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa PPKn untuk mengembangkan empati, kritik sosial, serta kesadaran politik yang lebih dalam, yang mendukung terbentuknya karakter yang berpihak pada demokrasi dan menghargai hak asasi setiap individu.

c. Aspek Psikomotorik Pendidikan Politik

Media sosial TikTok menyediakan berbagai informasi dan berita politik yang dapat menjadi saluran dalam membentuk keterampilan mahasiswa PPKn dalam menghadapi sebuah isu-isu yang tersebar. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian aspek psikomotorik pendidikan politik mahasiswa PPKn:

- 1) Kemampuan mendengar, yang terwujud dari: postingan di media sosial TikTok yang biasanya berisikan video yang di *upload* dalam format yang berpart-part dengan durasi yang singkat. Mahasiswa PPKn menunjukkan upaya untuk menyimak dan memahami isu yang sedang viral secara lengkap di dalam *platform* tersebut. Dengan adanya konten-konten di media sosial ini membantu melatih mahasiswa PPKn untuk cakap dalam mendengarkan sebuah pembahasan dengan penuh perhatian hingga mencoba memastikan sebuah informasi yang diterima secara lengkap. Seperti yang terlihat dalam hasil wawancara

bersama Fikri mahasiswa PPKn angkatan 2022:

“persoalan-persoalana politik itu pada saat saya dapati yang terpotong-potong videonya nonton dulu yang part 1 setelah saya nonton saya buka akunnya kemudian saya lihat lanjutan dari pada part yang saya sudah pernah saya nonton. Disitu biasanya langsung nonton dan saya dengarkan pembahasannya 1 kali sampai selesai bukan saya tunggu fyp part selanjutnya” (Wawancara, 12 Juni 2024).

- 2) Kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan, yang terwujud dari: postingan di media sosial TikTok yang menampilkan dinamika politik yang aktual. Mahasiswa PPKn menunjukkan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan-persoalan tersebut. Dengan adanya konten-konten di media sosial ini membantu melatih mahasiswa PPKn dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Arjun Iskandar mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“terkait pengambilan keputusan yang saya saksikan, ada konten yang sering muncul di beranda saya. Salah satunya membahas masalah kesehatan yang saat ini sedang hangat, yaitu penghapusan BPJS kelas 1, 2, dan 3. Dalam konten tersebut dijelaskan bahwa jika ada pasien yang menjalani rawat inap, mereka akan dikenakan tambahan biaya. Saya bisa mengidentifikasi persoalan ini sebagai kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat ekonomi bawah. Persoalan utamanya adalah bagaimana kebijakan ini dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang gratis dan layak. Dari hal tersebut saya dapat memberikan deskripsi bahwa, pemerintah seharusnya mengambil keputusan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan jaminan kesehatan tanpa tambahan beban biaya.” (Wawancara 12 Juni 2024).

- 3) Kemampuan menganalisis, yang terwujud dari: postingan mengenai sistem politik Indonesia, dalam hal ini mengenai tiga cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di media sosial TikTok. Mahasiswa PPKn menunjukkan kemampuannya dalam menganalisis postingan-postingan mengenai peristiwa yang terjadi di tiga cabang kekuasaan tersebut. Dengan adanya konten-konten di media sosial ini membantu melatih mahasiswa PPKn dalam mengembangkan kemampuan ini. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Rivaldi Maha mahasiswa PPKn angkatan 2021:

“saya pernah menyaksikan rapat DPR melalui konten di TikTok. DPR terbagi ke dalam berbagai komisi, dan masing-masing komisi memiliki tugas di bidang tertentu. Salah satu fungsi utama rapat-rapat ini adalah menyampaikan dan membahas aspirasi masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR. Dari sini, saya menganalisis bahwa peran anggota DPR sangat penting dalam memastikan aspirasi tersebut tidak hanya disampaikan, tetapi juga diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan. Namun, saya juga menyadari bahwa sebagai mahasiswa, posisi saya saat ini hanya memungkinkan untuk menyuarakan aspirasi, tanpa memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya keterhubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan wakil-wakilnya untuk memastikan aspirasi benar-benar diperjuangkan di tingkat legislatif” (Wawancara 05 Mei 2024).

- 4) Kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik, yang terwujud dari: postingan mengenai isu-isu viral yang kontroversial di media sosial TikTok, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mahasiswa PPKn menunjukkan kemampuannya dalam memberikan evaluasi terhadap isu-isu tersebut. Mahasiswa PPKn melakukan penilaian kekuatan dan kelemahan terhadap isu-isu tersebut, serta tujuan dan alat untuk mencapainya. Dengan adanya isu-isu tersebut di media sosial ini membantu melatih mahasiswa PPKn dalam mengembangkan kemampuan ini. Seperti yang terlihat dalam wawancara bersama Dirfan Udi mahasiswa PPKn 2020:

“persoalan UKT ini yang masi hangat. Jadi ada beberapa kampus sampai turun ke jalan. Sampai ada Rektor yang mau memenjarakan mahasiswa nya yang demo UKT itu. Setelah saya analisi itukan memang tidak benar juga tiba-tiba muncul isu kenaikan UKT mendadak, walaupun memang tidak berlakuk mahasuswa lama tapi untuk maba. Tapi misal kalau kita dapat mahasiswa yang mampu tidak jadi soal. Tapi bagaimana kira-kira yang mendapatkan di kelas menengah-bawah. Kenapa pemerintah sampai setengah itu dengan rakyatnya. Dari sisi keunggulan, kenaikan UKT bagi mahasiswa yang mampu tidak jadi masalah, karena mereka dapat menanggung biaya kuliah. Namun, persoalannya muncul untuk mahasiswa dari kelas menengah ke bawah. Mereka mungkin akan kesulitan jika biaya kuliah meningkat mendadak. Menurut saya untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan kebijakan subsidi atau penyesuaian biaya pendidikan yang lebih mengakomodasi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang berbeda” (Wawancara 04 Juni 2024).

Berdasarkan teori M. Nur Khoiron dan Istikharah & Asrinaldi, mengenai aspek psikomotorik dalam pendidikan politik yang bertujuan untuk membangun kecakapan intelektual dan moral guna mewujudkan Indonesia yang demokratis dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya sejalan. Mahasiswa PPKn tidak hanya memperoleh informasi politik melalui konten-konten yang tersedia di TikTok, tetapi juga mengasah kemampuan psikomotorik mereka dalam menghadapi isu-isu yang sedang berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mendeskripsikan fungsi media sosial TikTok dalam mewujudkan pendidikan politik mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo. Peneliti menemukan fungsi media sosial TikTok yang digunakan mahasiswa PPKn Universitas Halu Oleo yakni sebagai sumber informasi dan berita politik dan memperluas jangkauan interkasinya, berupa memberikan *like*, mengikuti akun, berkomentar, dan membagikan (*shear*) pengetahuan dan informasi politik. Dalam ranah pendidikan politik yang dilihat dari aspek kognitif, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam membentuk pemahaman mahasiswa PPKn. Dalam ranah afektif, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam mendorong dan membentuk sikap mahasiswa PPKn terhadap sebuah peristiwa. Dalam ranah psikomotorik, terwujud dari media sosial TikTok yang menjadi saluran dalam membentuk keterampilan mahasiswa PPKn dalam menghadapi sebuah isu-isu yang tersebar.

Berdasarkan kesimpulan di atas mahasiswa PPKn sebaiknya terus mempertahankan aktivitas mereka di media sosial TikTok, bahkan lebih mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur yang ada, terutama dalam memberikan komentar dan membagikan informasi serta pengetahuan seputar pendidikan politik, sehingga algoritma TikTok yang mereka dapatkan mengenai isu-isu politik dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam mewujudkan pendidikan politik mereka dalam ketiga domain pendidikan yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. B., Hasyim Ashar, & Asmurti. (2024). Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Sumber Informasi Bagi Gen Z di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 53–62. <https://www.iyb.ac.id/jurnal/index.php/jgp/article/view/304>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. apjii.or.id. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Barus, I. M. P., Lestari, A. S. A., & Pritalia, G. L. (2024). Analisis Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Sumber Informasi Pembelajaran Bagi Mahasiswa. *Prosiding Konstelasi*, 1(1). <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/prosidingkonstelasi/article/view/9063>
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Percetakan Pohon Cahaya.
- Irawan, G. N. (2024). *Aplikasi TikTok sebagai Media Informasi Berita Lokal (Studi Kasus Aplikasi TikTok Sebagai Media Informasi Berita Lokal pada Media Online Infobdgbaratcimahi)*. Universitas Pasundan Bandung. <http://repository.unpas.ac.id/68917/>
- Istikharah, & Asrinaldi. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314–328. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>
- Muhamad, N. (2024). *Jenis Konten di Internet yang Sering Diakses Responden (Desember 2023-Januari 2024)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/apjii-politik-jadi-konten-yang-paling-digemari-masyarakat-pada-2024>
- Nadia, D. (2023). *Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Generasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30617/>

- Oktaheriyani, D., Wafa, M. A., & Shadiqien, S. (2020). Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3504/>
- Pusparisa, Y. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia (2024)*. databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/usia-produktif-diprediksi-kembali-mendominasi-pada-pemilu-2024>
- Rakhmayanti, I. (2024). *Indonesia Nomor 1 Dunia, Warga RI Sudah Kecanduan TikTok*. CNBC Indonesia.
- Sangadji, F. A. P., Fitri, A. C. S., Sitanggang, D. A., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Peran Media Sosial TikTok sebagai Platform untuk Pengembangan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 143–149. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/683
- Satria, A., Kurniawan, M. T., Amanda, P. I., & Arkan, D. (2024). Social Media Instagram, TikTok, dan X dalam Pengungkapan Pelanggaran Hukum dalam Konflik antara Palestina dan Israel. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi (JIUTITI)*, 4(1), 14–27. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v4i1.3419>
- Susanti, E., Salsabila, N., & Syabila, T. (2023). *Analisis Interaksi Sosial Mahasiswa Pelanggan Aplikasi Tiktok pada Mahasiswa IPS*. 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11993>
- Susetyo, B. (2022). *Trik Penelitian Di Lingkungan Pendidikan*. Uwais Inspirasi Indonesia.